



Perbandingan Penerapan Kurikulum Pendidikan Dasar Antara Malaysia dan Indonesia

Nofitri Wulan Ramadhani¹, Hana Fadhilah², Annera Armeilia Siagian³, Delvi Durrotul Hikmah⁴, Nazira Amelia Putri⁵, Mawar Mawar⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email : nvtrwulan@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 01, 2025

Revised Oktober 17, 2025

Accepted Oktober 25, 2025

Keywords:

Curriculum Comparison, Basic Education Curriculum, KSSR, Merdeka Curriculum, Malaysia, Indonesia

ABSTRACT

Primary education has become a key focus for many governments in developing human resources. This study explores the differences in the implementation of basic education curricula between Malaysia and Indonesia, highlighting the distinct challenges and opportunities each country faces in improving education quality and producing competitive generations. The research aims to compare the characteristics, strengths, and weaknesses of the Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) in Malaysia and the Kurikulum Merdeka in Indonesia. It also seeks to identify the critical factors affecting the effectiveness of their implementation. This study applies a literature review method by analyzing policy documents, educational journals, and previous research findings. The results show that Indonesia's Kurikulum Merdeka emphasizes flexibility, project-based learning, and character development through the Pancasila Student Profile, while Malaysia's KSSR highlights a holistic, student-centered approach with integrated technology. The major challenge in Malaysia lies in teacher readiness and limited infrastructure in rural areas. In Indonesia, the main issue is the lack of preparation among teachers and schools to adopt a more flexible learning approach. Both countries require strengthened teacher capacities, equal distribution of resources, and consistent policy support to achieve optimal goals in basic education. The novelty of this study lies in its comparative analysis of curriculum implementation between two Southeast Asian countries, offering a unique insight into how national education philosophies and socio-economic contexts shape curriculum effectiveness and equity.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 01, 2025

Revised Oktober 17, 2025

Accepted Oktober 25, 2025

Kata Kunci:

Perbandingan Kurikulum, Kurikulum Pendidikan Dasar, KSSR, Kurikulum Merdeka, Malaysia, Indonesia

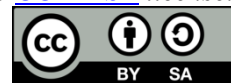
ABSTRAK

Pemerintah berbagai negara telah menjadikan pendidikan dasar sebagai salah satu topik pembahasan dan prioritas dalam pengembangan sumber daya manusia. persoalan yang di angkat yaitu perbedaan penerapan kurikulum pendidikan dasar antara Malaysia dan Indonesia, yang masing-masing dari kedua negara menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun generasi yang kompetitif. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan karakteristik, keunggulan, serta kendala penerapan Kurikulum Standar Sekolah Rendah (KSSR) di Malaysia dan Kurikulum Merdeka di Indonesia, tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kedua kurikulum tersebut di laksanakan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis dokumen kebijakan, jurnal pendidikan. serta hasil-hasil penelitian terkait penerapan kurikulum di kedua negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kurikulum Merdeka Indonesia



menekankan fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, sementara KSSR Malaysia menekankan pendekatan holistik, berpusat pada siswa dan integrasi teknologi. Di Malaysia, masalah utama adalah kesiapan guru dan keterbatasan infrastruktur di wilayah pedalaman. Di Indonesia, tantangannya terletak pada guru dan sekolah tidak siap untuk menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel. Untuk mencapai tujuan pendidikan dasar yang optimal, kedua negara memerlukan penguatan kapasitas guru, pemerataan sumber daya, dan dukungan kebijakan yang konsisten. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang mendalam antara penerapan kurikulum pendidikan dasar di dua negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia, yang selama ini jarang dibandingkan secara sistematis. Penelitian ini tidak hanya membahas isi kurikulum, tetapi juga menelaah konteks sosial, kesiapan infrastruktur, dan pendekatan kebijakan dalam pelaksanaan kurikulum. Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana filosofi pendidikan nasional dan kondisi sosial-ekonomi suatu negara memengaruhi efektivitas serta pemerataan implementasi kurikulum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Novitri Wulan Ramadhani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: nvtrwulan@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar adalah langkah penting dalam membangun karakter dan kemampuan seseorang, yang berdampak besar pada pertumbuhan masyarakat dan negara. Malaysia dan Indonesia memiliki sistem pendidikan dasar yang berbeda di Asia Tenggara, tetapi keduanya berusaha meningkatkan pendidikan untuk menghasilkan generasi yang kompetitif. Sangat penting untuk melakukan perbandingan bagaimana kedua negara ini menerapkan kurikulum pendidikan dasar, karena keduanya memiliki kesulitan dan peluang pendidikan yang berbeda (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2022).

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia suatu negara. Malaysia, negara multikultural dan berpendapatan menengah ke atas, telah melakukan banyak reformasi kurikulum untuk meningkatkan pendidikan dasar. Pemerintah Malaysia menetapkan kurikulum berbasis standar nasional melalui *Malaysia Education Blueprint 2013–2025*. Cetak biru tersebut menekankan peningkatan literasi, numerasi, keterampilan abad ke-21, dan penggunaan teknologi dalam proses pendidikan (Kementrian Pendidikan Malaysia, 2017).

Perkembangan kurikulum di setiap negara mencerminkan upaya sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tantangan di seluruh dunia, dan perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Kurikulum dasar (pendidikan rendah) di Malaysia bertujuan untuk membuat siswa seimbang dari segi intelektual, emosional, rohani, dan jasmani (Laman KSSR, 2021).

Pemerintah Malaysia telah mengubah model penerapan kurikulumnya sejak Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan kemudian Kurikulum Standar Sekolah Rendah (KSSR) untuk lebih sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 (Kementerian Pendidikan Malaysia,



2017). Pengembangan kurikulum dasar di Malaysia fokus pada penerapan pendekatan yang berpusat pada siswa, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, dan penekanan pada elemen karakter dan nilai murni. Pengganti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) di Malaysia, Kurikulum Standar Sekolah Rendah (KSSR) mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2011. KSSR adalah hasil dari transformasi pendidikan dasar yang bertujuan untuk membentuk orang yang seimbang dan holistik sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Kurikulum ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, pendidikan saksama untuk setiap siswa, dan pendidikan seumur hidup (Ecentral, 2023)

Tujuan utama pemerintah Malaysia dalam menerapkan KSSR adalah untuk memastikan bahwa siswa dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan prinsip yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Fokus transformasi kurikulum ini adalah meningkatkan kemampuan menulis, membaca, dan mengira (3M), serta menambahkan kemahiran menaakul sebagai komponen penting dalam pengembangan kognitif siswa. KSSR juga menekankan pada penguasaan keterampilan literasi dan numerasi, serta penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran (Kementrian Pendidikan Malaysia, 2017).

KSSR diterapkan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang menekankan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Pembelajaran berbasis proyek, inkuiri penemuan, pembelajaran melalui permainan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TMK) adalah beberapa pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang digunakan. Melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Islam dan Sejarah, kurikulum ini mengintegrasikan nilai-nilai dasar dan pembangunan sahsiah murid. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa setia negara dan jati diri sebagai warga negara Malaysia (Festival Journal, 2022).

Pemerintah memilih KSSR sebagai model kurikulum dasar karena kurikulum ini dirancang untuk memenuhi keperluan dan cabaran semasa serta akan datang, dengan memastikan siswa dibekali dengan pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang relevan. Kurikulum ini juga berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan mengambil kira masukan dari berbagai pihak berkepentingan seperti pertubuhan bukan kerajaan, industri, akademik, dan ibu bapa.

Oleh karena itu, tujuan KSSR adalah untuk menghasilkan orang-orang yang seimbang, harmonis, berakhlak mulia, kritis, kreatif, dan inovatif, serta memiliki kemahiran insaniah untuk siap menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Salah satu keuntungan dari kurikulum KSSR adalah bahwa itu bertujuan untuk mengajarkan siswa keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, yang merupakan empat elemen utama pembelajaran modern. Dengan metode ini, siswa dididik untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Metode pengajaran KSSR mengutamakan partisipasi aktif siswa. Guru kini berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran dan bukan hanya pemberi informasi. Ini mendorong pembelajaran yang bermakna, aktif, dan eksploratif. Selain keuntungannya, tentu saja ada kekurangan. Banyak guru menghadapi tantangan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran aktif dan berpusat pada murid. Sebagian guru terus menggunakan metode pengajaran tradisional, yang tidak sesuai dengan prinsip KSSR. Mereka sering terbebani dengan banyak tugas pelaporan dan dokumentasi, seperti perencanaan pelajaran harian dan penilaian terus-menerus. Akibatnya, fokus guru berkurang dalam mengajar



dengan baik. Tidak semua sekolah, terutama di daerah pedalaman, memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur, teknologi, dan bahan bantu mengajar yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum dengan baik (Festival Journal, 2022)

Selain Malaysia yang menerapkan Kurikulum KSSR, Indonesia juga memiliki Kurikulum Merdeka sebagai sistem pendidikan yang digunakan saat ini. Pada tahun ajaran 2022/2023, Kurikulum Merdeka mulai diterapkan secara resmi di sekolah-sekolah di Indonesia. Kebijakan ini diambil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum untuk mendukung pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Kurikulum Merdeka ini merupakan pengembangan dari Kurikulum Darurat yang sebelumnya digunakan selama masa pandemi Covid-19, dengan tujuan memberikan fleksibilitas bagi guru dan siswa dalam proses belajar-mengajar. (Priyadi et al., 2024)

Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Siswa bisa memilih mata pelajaran yang mereka sukai, sehingga proses belajar jadi lebih menyenangkan dan bermakna, baik di dalam maupun di luar kelas. Kurikulum ini terdiri dari tiga jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran di dalam kelas (in-kurikuler), kegiatan pendukung seperti proyek atau praktik (ko-kurikuler), dan kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler. Salah satu ciri khasnya adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diajak untuk bekerja dalam kelompok, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah nyata. Khusus di jenjang SMA, siswa tidak lagi dibatasi pada jurusan IPA, IPS, atau Bahasa sejak awal, tetapi bisa memilih mata pelajaran sesuai keinginan mereka. (Firmansyah Syaputra et al., 2023)

Kurikulum Merdeka diterapkan dengan berbagai model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dan kerja sama antar peserta didik. Model penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih dan mengembangkan model pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, seperti model walking gallery, serta menerapkan strategi diferensiasi konten sesuai minat dan gaya belajar siswa (audio, kinestetik, atau audio visual), disertai pendekatan sosial-emosional seperti ice breaking di awal pembelajaran untuk meningkatkan semangat dan hasil belajar. Guru juga berperan memotivasi, mengondisikan siswa agar lebih aktif, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. (Muchtar et al., 2024)

Model penerapan lain dalam Kurikulum Merdeka dilakukan dengan memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat memilih dan mengembangkan metode serta materi ajar yang paling sesuai dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik siswa di kelasnya. Siswa juga didorong untuk belajar secara lebih mandiri, aktif, dan kreatif, serta dapat memilih aktivitas atau sumber belajar yang relevan dengan gaya belajar mereka, sementara penilaian juga disesuaikan agar lebih menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, personal, dan adaptif terhadap perubahan zaman. (Tunas & Pangkey, 2024).

Kurikulum Merdeka juga menerapkan model yang lebih terbuka dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah pusat. Dalam proses perancangannya, pemerintah mengajak guru, orang tua, dan masyarakat untuk ikut memberikan masukan agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah di berbagai daerah. Penerapannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari sekolah-sekolah yang menjadi



percontohan (disebut Sekolah Penggerak), lalu secara perlahan diperluas ke sekolah lain. Model ini disebut sebagai model "bottom-up", artinya kebijakan tidak hanya datang dari atas (pemerintah pusat), tetapi juga memperhatikan aspirasi dan pengalaman di lapangan (Umar et al., 2025)

Kurikulum Merdeka dibuat dengan tujuan supaya kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah dimengerti dan menyenangkan bagi para siswa. Melalui kurikulum ini, sekolah dan guru diberikan keleluasaan untuk mengatur metode pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan begitu, suasana belajar diharapkan tidak kaku atau membosankan. Kurikulum ini juga mendorong siswa untuk menjadi lebih mandiri, mampu berpikir secara kritis, dan peka terhadap keadaan di sekitarnya. Di sisi lain, guru juga ditantang untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi, agar pembelajaran menjadi lebih hidup dan relevan dengan kondisi zaman sekarang. (Tunas & Pangkey, 2024)

Kurikulum Merdeka memiliki banyak kelebihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satu kelebihannya adalah adanya program Guru Penggerak yang membantu meningkatkan kemampuan guru agar bisa mengajar dengan lebih baik. Selain itu, ada juga program Sekolah Penggerak yang mendorong sekolah untuk menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya. Kurikulum ini juga memperkuat Profil Pelajar Pancasila, yaitu karakter siswa yang beriman, mandiri, gotong royong, dan siap menghadapi perubahan zaman. Dengan sistem yang lebih fleksibel dan memberi kebebasan pada siswa, proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan sesuai dengan minat serta kemampuan masing-masing.

Meski begitu, penerapan Kurikulum Merdeka juga masih menghadapi beberapa kendala. Banyak guru yang belum sepenuhnya paham bagaimana cara menerapkan kurikulum ini, sehingga pelaksanaannya di sekolah masih belum maksimal. Di beberapa daerah, terutama di sekolah dasar, fasilitas belajar juga masih kurang mendukung. Hal ini membuat proses belajar tidak bisa berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, perlu ada bantuan dan pendampingan yang terus-menerus agar semua sekolah bisa menjalankan Kurikulum Merdeka dengan baik. Jika semua pihak bekerja sama, kurikulum ini bisa membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di Indonesia (Firdaus & Permana, 2024)

Kurikulum dasar di Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan dan fitur yang berbeda, masing-masing disesuaikan dengan visi pendidikan negara tersebut. Kurikulum Standar Sekolah Rendah (KSSR) Malaysia berbasis pada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan bertujuan untuk menghasilkan siswa yang seimbang dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani. Kurikulum ini menggunakan pendekatan holistik dan berpusat pada siswa dengan fokus pada kemahiran abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi (4K). Selain itu, kurikulum ini mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TMK) ke dalam pelajaran untuk meningkatkan nilai. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka Indonesia berlaku sejak 2022. Kurikulum ini dibuat dalam upaya reformasi pendidikan untuk memberikan ruang kebebasan yang lebih besar bagi guru dan siswa. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis proyek, penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, dan diferensiasi pembelajaran yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan unik siswa (Kementrian Kebudayaan RI, 2022).



Keunggulan KSSR terletak pada penyelarasan pengajaran Bahasa Inggris dengan Common European Framework of Reference (CEFR) dan struktur kurikulum nasional yang konsisten dan standar. Selain itu, KSSR mendukung kebijakan seperti Transformasi Sekolah 2025 (TS25). Sementara itu, kurikulum bebas di Indonesia menonjol karena menempatkan penekanan kuat pada pembentukan karakter siswa dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan lokal. Namun, kedua kurikulum ini memiliki kendala. Di Malaysia, pelaksanaan KSSR masih menghadapi beberapa tantangan.

Beberapa di antaranya adalah guru yang tidak siap untuk menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, kurangnya akses teknologi di daerah pedalaman, dan pendekatan penilaian yang kaku. Di Indonesia, masalah utama adalah banyak sekolah, terutama di wilayah tertinggal, yang tidak siap untuk mengadopsi pendekatan Kurikulum Merdeka yang fleksibel. Walaupun setiap negara memiliki strategi yang kuat untuk membangun generasi berikutnya, penguatan kapasitas guru, pemerataan sumber daya, dan dukungan kebijakan yang konsisten masih diperlukan untuk implementasi di lapangan.

Di Indonesia, jenjang pendidikan dasar meliputi 6 tahun di sekolah dasar, dilanjutkan dengan 3 tahun di sekolah menengah pertama, kemudian 3 tahun lagi di sekolah menengah atas atau kejuruan. Sementara itu, di Malaysia, sistem pendidikannya terdiri dari 6 tahun sekolah rendah, 3 tahun sekolah menengah rendah, dan 2 tahun sekolah menengah atas, sebelum melanjutkan ke program tingkat 6 sebagai persiapan masuk perguruan tinggi (Razaqna & Putra, 2024)

Bahasa pengantar yang digunakan di Indonesia umumnya adalah Bahasa Indonesia, meskipun ada pula yang memakai bahasa daerah sesuai dengan letak geografisnya. Sementara di Malaysia, bahasa pengantar lebih beragam, seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, Mandarin, atau Tamil, tergantung jenis dan lokasi sekolah yang diikuti siswa. Dalam hal transportasi, pelajar di Indonesia umumnya pergi ke sekolah dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Hanya sebagian kecil sekolah yang menyediakan layanan antar-jemput siswa. Berbeda dengan itu, di Malaysia mayoritas sekolah menyediakan fasilitas bus sekolah gratis yang disubsidi oleh pemerintah untuk mengantar dan menjemput siswa (Julius, 2024)

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tingkat fleksibilitas dan desentralisasi kebijakan. Kurikulum Merdeka di Indonesia memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi guru dan satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, sedangkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di Malaysia menerapkan pendekatan yang lebih terpusat dengan standar kurikulum yang seragam secara nasional. Meski demikian, kedua kurikulum tersebut memiliki tujuan yang sejalan, yakni mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di tingkat global. Berdasarkan hasil kajian dan berbagai jurnal pendidikan, Kurikulum Merdeka dipandang sebagai bentuk reformasi pendidikan di Indonesia yang menekankan pembelajaran yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan. Di sisi lain, KSSR dinilai berhasil mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran guna membentuk sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi literatur (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan membandingkan penerapan kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dan Malaysia berdasarkan sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan. Fokus penelitian diarahkan pada aspek-aspek utama dalam kurikulum, seperti struktur isi, strategi pembelajaran, peran guru, penggunaan teknologi, fleksibilitas kebijakan, serta tantangan implementasi. Seluruh proses penelitian dilakukan tanpa pengumpulan data primer, melainkan dengan menelaah berbagai dokumen akademik dan kebijakan pendidikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui sumber data yang terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku referensi, laporan hasil penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan dari lembaga resmi. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi topik dan informasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang membahas Kurikulum Merdeka di Indonesia dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di Malaysia, kemudian menyusun data tersebut secara sistematis sesuai dengan fokus perbandingan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi dan tematik. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan fokus kajian, seperti struktur kurikulum, pendekatan pembelajaran, peran guru, fleksibilitas kebijakan, serta tantangan implementasi. Setiap tema dianalisis secara deskriptif untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara Kurikulum Merdeka di Indonesia dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah di Malaysia. Hasil analisis disusun dalam bentuk uraian komparatif yang sistematis dan objektif, serta disesuaikan dengan konteks aktual pendidikan dasar di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelebihan dan Kekurangan dari Kurikulum Malaysia dan Indonesia

Kurikulum standar sekolah rendah (KSSR) di Malaysia merupakan salah satu wujud transformasi pendidikan yang menyeluruh dan terstruktur. Kurikulum ini dirancang untuk membuat siswa yang seimbang dalam berbagai aspek, termasuk intelektual, spiritual, emosional, dan jasmani, sejalan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Keunggulan utama KSSR terletak pada pendekatannya yang sistematis dan berbasis nasional, yang menjamin keseragaman kualitas pembelajaran di seluruh sekolah. Penekanan pada keterampilan abad ke-21 seperti berbasis kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif menjadi ciri khas yang mencerminkan kesiapan menghadapi tantangan global. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TMK) dalam kegiatan belajar mengajar juga menjadi bagian integral dari kurikulum ini. Namun demikian, pelaksanaan KSSR masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal kesiapan guru di lapangan. Banyak guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran tradisional yang tidak sesuai dengan prinsip berpusat pada murid. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di daerah pedalaman membuat implementasi KSSR tidak merata. Administrasi yang rumit dan beban pelaporan yang tinggi juga menyulitkan guru untuk fokus pada proses belajar mengajar secara maksimal (Marzaini et al., 2023).

Di sisi lain, Kurikulum Merdeka di Indonesia merupakan langkah reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan dan otonomi yang lebih besar kepada guru dan



peserta didik. Kurikulum ini hadir sebagai respons terhadap tantangan pendidikan di era digital dan pasca pandemi, dengan mengedepankan prinsip pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan berbasis pada diferensiasi. Salah satu kelebihan menonjol dari Kurikulum Merdeka adalah kemampuannya untuk menyesuaikan kegiatan belajar dengan karakteristik, kebutuhan, dan minat individu siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Selain itu, adanya integrasi nilai-nilai karakter dalam Profil Pelajar Pancasila memperkuat peran pendidikan sebagai wahana pembentukan kepribadian. Meskipun begitu, penerapan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya optimal karena masih banyak guru yang kesulitan memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep baru yang ditawarkan. Kurangnya pelatihan, pendampingan, dan sumber daya penunjang membuat pelaksanaan di lapangan seringkali tidak sesuai dengan semangat awal kurikulum. Terlebih lagi, di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur, penerapan model pembelajaran berbasis proyek dan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri (Firdaus & Permana, 2024).

Dilihat dari efektivitas penerapannya, KSSR memiliki keunggulan dalam konsistensi standar dan arahan pembelajaran yang terpusat. Hal ini memungkinkan pemerintah Malaysia untuk mengontrol dan mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional dengan lebih efisien. Di sisi lain, sifat sentralistik tersebut juga menjadi kekurangannya karena mengurangi ruang gerak guru dalam menyesuaikan materi dan metode ajar dengan kondisi lokal. Sementara itu, Kurikulum Merdeka memberikan ruang kebebasan yang luas bagi guru untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks siswa masing-masing. Namun, fleksibilitas ini menuntut kompetensi guru yang tinggi dan merata di seluruh Indonesia, yang dalam praktiknya masih belum tercapai. Perbedaan kualitas guru dan fasilitas antar sekolah menciptakan kesenjangan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru secara sistematis dan dukungan kebijakan yang konsisten sangat penting agar fleksibilitas ini tidak menimbulkan ketimpangan (Tunas & Pangkey, 2024).

Secara umum, baik KSSR di Malaysia maupun Kurikulum Merdeka di Indonesia sama-sama mengusung semangat untuk menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global. Keduanya menekankan pentingnya pengembangan karakter, keterampilan berpikir kritis, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Namun, pendekatan yang digunakan berbeda. KSSR cenderung lebih struktural dan normatif, sementara Kurikulum Merdeka bersifat partisipatif dan kontekstual. Perbedaan ini mencerminkan filosofi pendidikan masing-masing negara, di mana Malaysia masih mengedepankan pendekatan top-down, sedangkan Indonesia mulai beralih ke pendekatan bottom-up dengan melibatkan sekolah, guru, dan komunitas pendidikan dalam pengambilan kebijakan. Meskipun begitu, keduanya masih membutuhkan penguatan dalam hal pelatihan guru, pemenuhan sarana prasarana, dan sistem evaluasi yang adaptif agar implementasi kurikulum dapat berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah (Umar et al., 2025).

B. Permasalahan Kurikulum di Malaysia dan Indonesia

Permasalahan kurikulum di Malaysia, terutama dalam penerapan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), menunjukkan bahwa meskipun kurikulum ini dirancang untuk menghadirkan pembelajaran abad ke-21, realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan visi tersebut. Salah satu isu utama adalah kesenjangan antara desain kurikulum dan kapasitas guru dalam melaksanakannya. Banyak guru di sekolah dasar masih bergantung pada metode



ceramah dan penugasan hafalan karena belum sepenuhnya memahami strategi pembelajaran berpusat pada murid yang menuntut kreativitas, fleksibilitas, dan pemanfaatan teknologi. Kurangnya pelatihan lanjutan yang bersifat praktis menyebabkan guru kesulitan menerjemahkan teori dalam kurikulum ke dalam praktik kelas sehari-hari. Selain itu, beban administratif yang tinggi termasuk laporan perencanaan pembelajaran dan penilaian formatif yang berulang-ulang membuat waktu guru untuk merancang pembelajaran yang inovatif menjadi terbatas. Beban ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pembelajaran, tetapi juga berpengaruh pada motivasi kerja guru, terutama di sekolah-sekolah dengan rasio murid yang tinggi dan dukungan teknis yang minim (Marzaini et al., 2023).

Kesenjangan dalam infrastruktur pendidikan menjadi permasalahan krusial lain dalam implementasi KSSR. Di banyak wilayah pedesaan dan terpencil di Malaysia, sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti koneksi internet stabil, laboratorium komputer, atau bahan ajar digital yang memadai. Padahal, kurikulum menuntut integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TMK) sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ketimpangan akses ini menyebabkan kualitas implementasi KSSR tidak merata antara sekolah perkotaan dan pedesaan. Bahkan di beberapa sekolah, keterbatasan tersebut mengakibatkan guru tetap mengandalkan metode papan tulis dan buku teks tanpa ada inovasi teknologi sama sekali. Selain itu, distribusi pelatihan guru juga belum merata, di mana pelatihan lebih banyak dilakukan di wilayah maju, sehingga guru-guru di daerah tertinggal merasa tidak terjangkau dan tertinggal dalam hal informasi kurikulum. Imbasnya, siswa di daerah tersebut menjadi kurang mendapatkan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan tantangan abad ke-21, yang sebenarnya menjadi fokus utama reformasi kurikulum Malaysia (Ramadhan, 2022).

Di Indonesia, penerapan Kurikulum Merdeka yang dimulai secara resmi pada tahun 2022 juga tidak luput dari berbagai permasalahan struktural dan kultural. Kurikulum yang menjanjikan fleksibilitas dan personalisasi pembelajaran ini ternyata menghadapi hambatan besar dalam pemahaman teknis di tingkat sekolah. Banyak guru belum mampu menyusun modul ajar yang sesuai dengan semangat kurikulum, terutama karena belum terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam banyak kasus, guru masih menerapkan pendekatan seragam terhadap seluruh siswa, padahal Kurikulum Merdeka justru menekankan pada pengakuan terhadap perbedaan gaya belajar, minat, dan kebutuhan peserta didik. Di sisi lain, pembelajaran berbasis proyek yang menjadi ciri khas kurikulum ini memerlukan perencanaan matang, kerja sama tim, dan sumber daya yang mendukung, yang mana belum semua sekolah memilikinya. Akibatnya, implementasi di lapangan cenderung bersifat formalitas dan belum menyentuh substansi pembaruan pendidikan yang diharapkan (Firdaus & Permana, 2024).

Permasalahan implementasi Kurikulum Merdeka semakin kompleks ketika dikaitkan dengan isu ketimpangan regional. Sekolah-sekolah yang berada di kota besar dan memiliki sumber daya lebih cenderung mampu menjalankan kurikulum ini secara ideal. Mereka memiliki akses terhadap pelatihan guru, bahan ajar yang lebih variatif, serta komunitas belajar yang mendukung. Sebaliknya, sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) masih mengalami banyak keterbatasan. Tidak jarang guru di daerah tersebut tidak mendapat pelatihan yang memadai, tidak memiliki akses internet yang baik, dan harus mengembangkan sendiri materi ajar dengan sangat minim referensi. Sementara itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat yang diharapkan dalam kurikulum berbasis konteks lokal juga belum berjalan dengan optimal. Padahal, semangat Kurikulum Merdeka menuntut kolaborasi semua pihak agar



pembelajaran tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di ruang kelas, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik.

Baik KSSR di Malaysia maupun Kurikulum Merdeka di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak cukup hanya dengan revisi dokumen atau penerbitan kebijakan baru. Permasalahan yang muncul lebih pada ekosistem implementasinya, mulai dari kesiapan guru, dukungan infrastruktur, hingga pola pikir pendidikan yang adaptif terhadap perubahan. Malaysia menghadapi persoalan rigiditas birokrasi dan akses teknologi, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan dalam menginterpretasi fleksibilitas dan menyamaratakan kualitas di tengah keragaman kondisi sekolah. Keduanya mengindikasikan pentingnya pendekatan berkelanjutan yang menekankan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan evaluasi reflektif terhadap praktik kurikulum. Tanpa langkah konkret dan sistemik untuk mengatasi masalah-masalah ini, kurikulum akan tetap menjadi dokumen normatif yang jauh dari kenyataan pembelajaran di lapangan.

C. Perbandingan Efektivitas dan Efisiensi Kurikulum Malaysia dan Indonesia

Efektivitas kurikulum dapat dianalisis menggunakan teori perbandingan yang menilai sejauh mana tujuan kurikulum tercapai dalam konteks sosio-kultural dan kebijakan nasional masing-masing negara. Di Indonesia, Kurikulum Merdeka menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama melalui pendekatan diferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek. Menurut Wahyuni, Iqbal, dan Baharuddin (2024) menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan literasi siswa sekolah dasar, serta mendorong keterlibatan siswa secara lebih aktif dalam proses pembelajaran. Guru merasakan adanya peningkatan minat belajar siswa dan penguatan kemampuan berpikir kritis. Namun, efektivitas ini masih sangat bergantung pada kesiapan guru dan dukungan pelatihan yang memadai. Di sisi lain, KSSR di Malaysia yang memiliki struktur kurikulum nasional yang terstandar justru mengalami kendala dalam hal fleksibilitas pengajaran di kelas. Meskipun dirancang untuk membangun karakter siswa melalui pendekatan holistik, masih banyak guru yang menerapkan model pembelajaran konvensional karena terbatasnya pelatihan modern, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pembelajaran (Marzaini et al., 2023; Wahyuni et al., 2024).

Dalam aspek efisiensi, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan yang besar kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan materi dan metode ajar berdasarkan kebutuhan lokal. Pendekatan ini secara teori lebih hemat sumber daya karena memungkinkan pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber belajar. Namun, efisiensi ini tidak tercapai secara merata, karena masih banyak sekolah yang terkendala oleh kurangnya infrastruktur, seperti jaringan internet dan perangkat pembelajaran digital. Menurut Mardiana dan Emmiyati (2023) mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka dapat meningkatkan efisiensi waktu belajar dengan mengurangi beban administratif dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, asalkan guru memiliki kompetensi dan fasilitas yang mendukung. Di Malaysia, meskipun KSSR menjanjikan efisiensi dalam hal pemerataan mutu melalui kurikulum nasional yang seragam, beban pelaporan dan sistem penilaian yang rigid justru menambah beban kerja guru, yang berdampak pada kurangnya waktu untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan kontekstual (Mardiana & Emmiyati, 2023; Ningsih, 2024).



Melalui teori perbandingan, terlihat bahwa perbedaan mendasar dari Kurikulum Merdeka dan KSSR terletak pada orientasi desentralisasi vs sentralisasi. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi inovasi lokal dan otonomi guru, yang dapat menghasilkan efektivitas dan efisiensi tinggi apabila didukung oleh pelatihan dan fasilitas. Sedangkan KSSR lebih stabil secara struktur dan terkontrol, namun berisiko stagnan apabila pelaksana di lapangan tidak cukup diberdayakan. Menurut Santoso dan Nugraheni (2024) menekankan bahwa keberhasilan efektivitas dan efisiensi implementasi kurikulum sangat bergantung pada kolaborasi antar pihak guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah. Jika dukungan sistemik ini tidak berjalan optimal, maka efektivitas maupun efisiensi kurikulum hanya akan menjadi wacana ideal yang sulit terwujud dalam praktik. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Malaysia masih perlu menguatkan sistem pelatihan guru dan pengawasan pelaksanaan kurikulum secara reflektif dan kontekstual (Santoso & Nugraheni, 2024; Rahma & Hindun, 2023).

KESIMPULAN

Meskipun kurikulum KSSR Malaysia memiliki struktur yang konsisten dan integrasi teknologi di seluruh negara, kesiapan guru dan akses ke infrastruktur adalah masalah. Kurikulum bebas di Indonesia menonjol karena fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan karakter. Namun, mereka menghadapi masalah dengan memahami guru dan keterbatasan fasilitas. Di Indonesia, masalah utama adalah ketimpangan sumber daya dan kurangnya kesiapan guru. Di Malaysia, masalah utama adalah pelatihan guru yang tidak merata dan beban administratif yang tinggi. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel, tetapi tidak seragam. Sementara KSSR lebih stabil, itu kurang fleksibel. Kurikulum Merdeka lebih efektif jika didukung oleh kemampuan guru, sedangkan KSSR kurang efektif karena sistemnya yang kaku. Untuk mencapai pendidikan dasar yang efisien dan merata, keduanya membutuhkan peningkatan kapasitas guru, infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung.

DAFTAR RUJUKAN

- Azzahra, N. F. (2022). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar: Peluang dan Tantangan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*.
- Aniexcha07. (2016). Analisis Kurikulum Negara Malaysia.
- Education, E., Program, S., Rihandini, F., Aswir, A., Teks, B., Inggris, B., Guru, B., & Merdeka, K. (2024). *THE CONTENT ANALYSIS OF 7 TH GRADE TEACHER MANUAL BOOK OF “ ENGLISH FOR NUSANTARA ” IN MERDEKA CURRICULUM*. 5(2).
- Kushnir, I. (2025). Thematic analysis in the area of education: a practical guide. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2471645>
- Laman KSSR. (2021). Prinsip KSSR: Kurikulum Standard Sekolah Rendah Malaysia.



- Razaqna, W., & Putra, W. (2024). Perbandingan Sistem Pendidikan di Malaysia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Wawasan Pendidikan*, 3(April), 1–10. <https://doi.org/10.59342/jgt.v3i1.481>
- Festiva Journal. (2022). Analisis Pelaksanaan KSSR dalam Pembentukan Sahsiah Murid Sekolah Rendah di Malaysia. ISRE: International Symposium on Religious Education, Universitas Riau.
- Firdaus, R., & Permana, J. (2024). Kelebihan dan Kekurangan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(3), 1885–1897. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7570>
- Firmansyah Syaputra, A., Hidayati, D., & Maya, N. (2023). Digitalisasi Pendidikan pada Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(11), 2207–2217. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i11.908>
- Marzaini, A. F. M., et al. (2023). The Teachers' Professional Development in the Implementation of CEFR-Aligned Classroom-Based Assessment. *Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning*.
- Mardiana, M., & Emmiyati, E. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran: Evaluasi dan Pembaruan. *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 10(2), 121–127. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v10n2.p121-127>
- Muchtar, A. A., Hidayat, T., Utsman, S., Ikhsan, M., Umam, M. I., & Putri, R. F. (2024). Penerapan Model Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka: Studi Kasus Di Sma Negeri 1 Pare. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(2), 575–587. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i2.3616>
- Priyadi, M. S., Rachmatia, M., Al Hadi, I. A., & Suhariyanti, M. (2024). Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. *Griya Cendikia*, 9(1), 114–121. <https://doi.org/10.47637/griyacendikia.v9i1.1094>
- Rahma, S. N., & Hindun, H. (2023). Efektivitas Kurikulum Merdeka dalam Proses Pembelajaran di Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Reduplikasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, 3(2), 1–14. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Reduplikasi/>
- Tunas, K. O., & Pangkey, R. D. H. (2024). Kurikulum Merdeka: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dengan Kebebasan dan Fleksibilitas. *Journal on Education*, 6(4), 22031–22040. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6324>
- Umar, M. R., Indraswari, C. G., & Setiawan, D. D. (2025). *Analisis Model Kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia*. 66–76.
- Wahyuni, S., Iqbal, M., & Baharuddin. (2024). Evaluasi efektivitas penerapan kurikulum merdeka dalam meningkatkan hasil belajar dan keterampilan literasi siswa sekolah dasar. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(3), 360–368. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v5i3.16736>



Kurniawan, J. T., & Dompok, T. (2024). *Perbandingan sistem pendidikan: Sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia*. Universitas Putera Batam. e-ISSN: 3025-9770

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi dan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kemendikbudristek.